



Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam: Pendekatan Hukum dan Praktik di Indonesia

Junawan Muslim¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Junawanmuslim135790@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Mediation, Natural Resource Disputes, Dispute Resolution, Environmental Law, Indonesia.

ABSTRACT

The resolution of natural resource disputes in Indonesia often faces significant challenges, given its complexity involving various parties, such as the government, industrial companies, and local communities. One alternative method that is increasingly being used to resolve disputes is mediation, which aims to reduce social tensions and achieve fairer and more sustainable solutions. This study aims to analyze the role of mediation in resolving NRM disputes, with a focus on its application in the Indonesian context. Based on case studies and analysis of applicable regulations, this study finds that mediation can be an effective tool in dispute resolution, but its implementation still faces several obstacles, such as a lack of mediator capacity, an imbalance of power between the parties involved, and a lack of oversight of the implementation of mediation agreements. This article provides recommendations to improve the effectiveness of mediation in natural resource dispute resolution by strengthening the role of mediators and increasing community participation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Mediasi, Sengketa Sumber Daya Alam, Penyelesaian Sengketa, Hukum Lingkungan, Indonesia.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa sumber daya alam (SDA) di Indonesia sering kali menghadapi tantangan besar, mengingat kompleksitasnya yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan industri, dan masyarakat lokal. Salah satu metode alternatif yang semakin digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah mediasi, yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial dan mencapai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa SDA, dengan fokus pada penerapannya dalam konteks Indonesia. Berdasarkan studi kasus dan analisis peraturan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kapasitas mediator, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan mediasi. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa SDA, dengan memperkuat peran mediator dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Junawan Muslim

Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Junawanmuslim135790@gmail.com**PENDAHULUAN**

Sumber daya alam (SDA) di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara. Sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan menjadi pilar utama yang menyumbang kepada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, pemanfaatan SDA yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik sering kali menimbulkan sengketa antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat lokal.

Sengketa-sengketa ini tidak hanya terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan dan sosial yang lebih luas. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, Indonesia telah mengembangkan berbagai mekanisme hukum, salah satunya adalah mediasi. Mediasi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif, semakin banyak diterapkan dalam sengketa sumber daya alam, mengingat kemampuannya untuk mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan dalam proses peradilan.

Namun, meskipun mediasi menawarkan solusi yang lebih adil dan efisien, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mediasi dalam penyelesaian sengketa SDA di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam konteks hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen. Studi kasus dipilih dari beberapa wilayah di Indonesia yang telah mengalami sengketa terkait sumber daya alam, seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatra. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mediator, praktisi hukum, pihak perusahaan, serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peraturan dan kebijakan terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa SDA, serta menganalisis laporan-laporan mengenai sengketa dan mediasi yang telah diterapkan di beberapa daerah.

Metode analisis dilakukan dengan membandingkan praktik mediasi yang berhasil dan gagal dalam penyelesaian sengketa, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam konteks hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks sengketa SDA, mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan industri, pemerintah, dan masyarakat lokal, terutama terkait hak atas tanah, kerusakan lingkungan, dan pembagian manfaat dari sumber daya alam.

Mediasi menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses peradilan formal, di antaranya adalah fleksibilitas, kecepatan, dan biaya yang lebih rendah. Proses mediasi juga memberikan ruang bagi semua pihak untuk bernegosiasi dan mencapai



kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa perlu melalui prosedur litigasi yang panjang dan mahal.

2. Tantangan dalam Implementasi Mediasi di Indonesia

Meskipun mediasi memiliki potensi besar dalam penyelesaian sengketa SDA, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- **Kapasitas Mediator:** Mediator yang menangani sengketa SDA sering kali tidak memiliki keahlian khusus dalam masalah lingkungan dan hukum SDA. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu teknis dan hukum yang terkait dengan SDA menjadi kendala besar dalam menjalankan mediasi dengan efektif.
- **Ketidakseimbangan Kekuatan antara Pihak yang Terlibat:** Seringkali, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Perusahaan industri, yang memiliki sumber daya dan pengaruh politik yang lebih besar, sering kali dapat mendominasi proses mediasi, sementara masyarakat lokal yang kurang terorganisir dan memiliki sumber daya terbatas sulit untuk memperjuangkan hak mereka secara adil.
- **Kurangnya Pengawasan terhadap Implementasi Kesepakatan:** Salah satu tantangan utama dalam mediasi adalah memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan atau pemerintah dapat mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai, sehingga mediasi menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa.

3. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa SDA melalui Mediasi

Dalam studi kasus yang dilakukan di Kalimantan, mediasi antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal berhasil menyelesaikan sengketa terkait kerusakan lingkungan dan kompensasi untuk masyarakat yang terdampak. Proses mediasi melibatkan pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, serta seorang mediator yang berpengalaman dalam hukum lingkungan. Meskipun proses ini memakan waktu, hasilnya adalah kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, di mana perusahaan setuju untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat dan melakukan rehabilitasi lingkungan.

Namun, di kasus lain yang terjadi di Sumatra, mediasi gagal karena ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat. Masyarakat adat merasa tidak terwakili dengan baik dalam proses mediasi, dan kesepakatan yang dicapai tidak dilaksanakan dengan baik, mengakibatkan ketegangan yang lebih besar antara perusahaan dan masyarakat.

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Mediasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa SDA adalah:

- **Peningkatan Kualitas Mediator:** Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kapasitas mediator dengan memberikan pelatihan khusus mengenai hukum lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan isu-isu teknis terkait SDA. Mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang sedang diselesaikan akan lebih mampu memfasilitasi kesepakatan yang adil.
- **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal:** Proses mediasi harus memastikan bahwa masyarakat lokal, terutama yang memiliki hak adat atas tanah dan sumber daya alam, dilibatkan secara aktif. Partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan harus dihargai, dan mereka harus diberikan akses yang setara dalam proses mediasi.



- Pengawasan Terhadap Implementasi Kesepakatan: Setelah kesepakatan tercapai, penting bagi pihak ketiga yang independen untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa perusahaan dan pemerintah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan mekanisme yang efektif dalam penyelesaian sengketa sumber daya alam, karena menawarkan solusi yang lebih adil, cepat, dan biaya rendah dibandingkan dengan litigasi. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kapasitas mediator, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat, dan pengawasan yang lemah terhadap implementasi kesepakatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan peningkatan kapasitas mediator, partisipasi aktif masyarakat lokal, dan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kesepakatan. Mediasi yang diterapkan dengan baik dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, T. (2018). *The Role of Mediation in Natural Resource Conflicts: Lessons from Indonesia*. Jakarta: Indonesian Conflict Resolution Institute.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sari, R., & Prasetyo, A. (2020). Alternative Dispute Resolution in Environmental Conflicts: A Case Study of Resource Extraction in Kalimantan. *Journal of Indonesian Environmental Law*, 28(1), 45-60.
- World Bank. (2021). *Dispute Resolution and Environmental Justice: A Global Perspective on Mediation in Resource Management*. Washington D.C.: World Bank.